

## DIPLOMASI KIM JONG UN DAN DENUKLIRISASI SEMENANJUNG KOREA

7

Sita Hidriyah

### Abstrak

*Kunjungan Kim Jong Un ke Rusia pada 25 April 2019 menarik perhatian media. Kunjungan tersebut dapat dilihat sebagai upaya pemimpin Korea Utara untuk memperluas ruang diplomasi, terutama setelah pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Hanoi pada Februari 2019 tidak membuahkan hasil. Terkait isu nuklir, Kim menjelaskan bahwa kedatangannya ke Rusia adalah untuk bertemu secara personal dengan Presiden Vladimir Putin dan berbagi pandangan soal kebuntuan perundingan nuklir. Banyak pihak berharap bahwa denuklirisasi Semenanjung Korea akan terus berjalan ke arah yang diharapkan, yakni terwujudnya Semenanjung Korea sebagai kawasan yang bebas dari senjata nuklir. Masyarakat internasional harus mengawal terwujudnya denuklirisasi Semenanjung Korea. ASEAN, termasuk Indonesia yang kini menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB, tidak boleh tinggal diam, tetapi harus mengambil peran dalam proses ke arah terwujudnya denuklirisasi Semenanjung Korea. Tulisan singkat ini mengkaji arti penting kunjungan Kim Jong Un ke Rusia dan bagaimana kaitannya dengan denuklirisasi Semenanjung Korea.*

### Pendahuluan

Kunjungan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un ke Rusia menemui Presiden Vladimir Putin pada 25 April 2019 menjadi salah satu berita internasional yang menarik perhatian media, khususnya di kawasan Asia Pasifik (*The Jakarta Post*, 26 April 2019). Menarik untuk diikuti karena pasca-pertemuan kedua antara Kim Jong Un dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Hanoi, Vietnam, akhir Februari 2019, tidak ada kemajuan

berarti dalam perkembangan diplomasi terkait denuklirisasi Semenanjung Korea. Pertemuan kedua antara Kim Jong Un dan Presiden Trump di Hanoi memang tidak menghasilkan kesepakatan dan telah menimbulkan kekecewaan sebagian masyarakat internasional, khususnya Korea Selatan yang sangat mengharapkan adanya kemajuan dalam isu denuklirisasi di Semenanjung Korea.

Oleh karena itu, kunjungan Kim Jong Un ke Rusia menarik



untuk dicermati dan dilihat konteksnya dengan harapan masyarakat internasional akan terciptanya denuklirisasi di Semenanjung Korea. Masyarakat internasional, khususnya yang berada di kawasan Asia Pasifik tentu sangat berharap bahwa situasi kondusif yang sudah terbangun dalam hubungan Korea Utara dan Korea Selatan tidak kembali mundur karena persoalan denuklirisasi di Semenanjung Korea belum berhasil dicapai, terutama antara Korea Utara dan AS. Sebagaimana diketahui, AS, yang bersekutu dengan Korea Selatan dalam menghadapi Korea Utara, sangat menentang program nuklir Korea Utara, dan sebaliknya, Korea Utara tidak begitu saja mau ditekan oleh AS. Dengan demikian, menjadi menarik untuk mengetahui apa arti penting kunjungan atau langkah diplomasi Kim Jong Un ke Rusia, mengapa hal itu dilakukan, dan bagaimana kaitannya dengan denuklirisasi Semenanjung Korea. Tulisan singkat ini mencoba mengkajinya.

### **Kunjungan Kim Jong Un ke Rusia**

Media menyebut, kunjungan Kim Jong Un ke Rusia dapat ditafsirkan sebagai upaya pemimpin Korea Utara untuk memperluas ruang diplomasinya dengan menemui Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia ingin memperlihatkan bahwa ada opsi lain yang mendukung posisinya. Para analis menilai, Kim kini mencari dukungan internasional yang lebih luas untuk menaikkan posisi tawarnya di hadapan AS

setelah pertemuannya dengan Presiden Donald Trump di Hanoi, dua bulan lalu, tidak menghasilkan kesepakatan apa pun (*Kompas*, 25 April 2019). Kim seakan mengingatkan AS bahwa dirinya memiliki opsi lain yang mendukung kepemimpinannya di kawasan.

Selama ini, China menjadi sekutu terpenting bagi Korea Utara. China merupakan mitra dagang terbesar dan pemasok minyak utama bagi Korea Utara, sehingga pertemuan Kim dan Putin juga bisa dilihat sebagai upaya untuk menyeimbangkan pengaruh China. Selain itu, meski tidak mudah dikabulkan oleh Rusia sebagai salah satu pemegang hak veto di Dewan Keamanan PBB, Kim juga memperjuangkan agar sanksi terhadap Korea Utara dicabut sebagai pengakuan atas moratorium uji coba nuklir dan rudal. Dengan pencabutan sanksi itu, pembangunan ekonomi di Korea Utara bisa dilakukan lebih leluasa.

Terkait isu nuklir, Kim, yang tiba di Vladivostok (Rusia) menggunakan kereta api anti peluru, menjelaskan bahwa hal tersebut adalah isu yang menarik perhatian dunia, dan kedatangannya ke Rusia adalah untuk bertemu secara personal dengan Putin dan berbagi pandangan soal kebuntuan perundingan nuklir. Meski pertemuan itu tidak menghasilkan kesepakatan, bahkan tidak ada pernyataan bersama sesuai pertemuan, para analis mengatakan, Kim mendapatkan apa yang ia cari dalam kunjungan

ke Rusia itu, terutama dalam konteks diplomasi Korea Utara (*Kompas*, 26 April 2019). Ini artinya, pertemuan puncak itu lebih banyak memperlihatkan simbol diplomatik dibandingkan kerja sama aktual. Dengan demikian bisa diartikan juga bahwa pertemuan dengan Putin merupakan babak lanjutan dalam diplomasi Kim setelah pertemuannya dengan Presiden AS Donald Trump di Vietnam, Februari 2019 tidak membuahkan hasil.

### **Jaminan Keamanan**

Hal lain yang juga bisa dibaca dari kunjungan Kim ke Rusia, atau langkah diplomasi Kim dengan menemui Presiden Putin, tidak terlepas dari upaya Kim untuk meminta jaminan keamanan bagi posisi dirinya, yang mungkin tidak ia peroleh secara meyakinkan dari AS. Setidaknya hal tersebut terbaca dari pernyataan Presiden Putin kepada wartawan usai pertemuannya dengan Kim Jong Un (*cnsnews.com.*, 25 April 2019). Rusia, yang selama ini memiliki hubungan dekat dengan Korea Utara, memang tidak bisa mengabaikan Kim Jong Un, yang ditegaskan oleh Putin perlu dijamin keamanannya. Dalam pandangan Putin, jaminan itu harus bersifat internasional, mengikat secara hukum, dan menjamin kedaulatan Korea Utara.

Jika memerhatikan pertemuan Kim Jong Un dengan Presiden AS Donald Trump di Hanoi akhir Februari 2019 yang tidak

menghasilkan kesepakatan dan menimbulkan kekecewaan banyak pihak, termasuk Kim sendiri, bisa saja timbul dugaan bahwa AS saat itu tidak bersedia memberikan jaminan keamanan kepada Kim. Hal itu kemudian mendorong Kim untuk melakukan kunjungan ke Rusia, salah satu negara anggota Dewan Keamanan PBB selain China yang memiliki hubungan cukup baik dengan Korea Utara, guna membicarakan isu keamanan di Semenanjung Korea, termasuk soal jaminan keamanan terhadap dirinya. Bagi Kim, jaminan keamanan ini dianggap penting jika komunitas global menginginkan Korea Utara melucuti senjata nuklirnya.

Dalam perspektif Kim, jaminan keamanan tersebut, tampaknya, harus satu paket dengan pencabutan sanksi PBB dan AS terhadap Korea Utara. Sebaliknya, pihak AS kerap menyatakan bahwa sanksi harus tetap berlaku sampai Korea Utara melakukan denuklirisasi. Di satu sisi, Korea Utara memang selalu mendesak pencabutan sanksi karena pihaknya merasa sudah menjalankan komitmen denuklirisasi. Namun di sisi lain, AS menuding bahwa Korea Utara belum sepenuhnya melakukan denuklirisasi, dan bersikeras bahwa sanksi tidak akan dicabut hingga Korea Utara melucuti total program nuklirnya. Menanggapi tuduhan AS, pihak Korea Utara menyatakan bahwa kebuntuan denuklirisasi disebabkan AS bergantung pada langkah-langkah koersif sehingga sulit dibangun kepercayaan.

## Prospek Denuklirisasi

Belum adanya titik temu antara Korea Utara dan AS terkait isu denuklirisasi memunculkan pertanyaan terkait prospek denuklirisasi Semenanjung Korea. Banyak pihak berharap bahwa denuklirisasi di Semenanjung Korea akan terus berjalan ke arah yang diharapkan, yakni terwujudnya Semenanjung Korea sebagai kawasan yang bebas dari senjata nuklir. Harapan ini tidak berlebihan, karena dalam beberapa tahun ke belakang, dunia, terutama negara-negara di kawasan, kerap menyaksikan aksi uji coba nuklir dan peluncuran peluru kendali (rudal) yang dilakukan Korea Utara sebagai respons atas kehadiran kekuatan militer AS di Semenanjung Korea (dalam bentuk latihan perang bersama dengan Korea Selatan). Situasi seperti itu, sudah tentu, tidak kondusif bagi keamanan kawasan jika kembali terjadi.

Oleh karena itu, diplomasi yang dilakukan Kim dengan mengunjungi Rusia, terlepas dari sikapnya yang dianggap tertutup soal nuklir, patut dilihat sebagai hal yang positif jika hal itu bertujuan untuk menjadikan Semenanjung Korea sebagai kawasan yang bebas dari senjata nuklir. Namun demikian, masyarakat internasional juga harus bersikap realistis, karena memang tidak mudah untuk mengharapkan rezim di Korea Utara yang selama ini tertutup dan otoriter, untuk segera berubah.

Oleh karena itu pula, masyarakat internasional perlu

terus mengawal momentum yang cukup baik dalam hubungan Korea Utara dan Korea Selatan yang telah bersepakat untuk mengakhiri perang, sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Panmunjom, hasil pertemuan puncak Kim Jong Un dan Moon Jae-in di Desa Panmunjom, 27 April 2018 (japantimes.co., 27 April 2018). Menurut deklarasi tersebut, Seoul dan Pyongyang sepakat untuk bekerja sama dalam mengakhiri Perang Korea, memulai era baru perdamaian, dan berbagi komitmen dalam mengakhiri konfrontasi, serta terus berupaya untuk membangun era baru rekonsiliasi nasional, perdamaian, dan kemakmuran, serta perbaikan hubungan antar-Korea. Deklarasi Panmunjom juga memuat tekad denuklirisasi Semenanjung Korea.

Dengan disepakatinya era baru perdamaian Korea Utara dan Korea Selatan, peluang untuk menjadikan Semenanjung Korea sebagai kawasan yang bebas dari senjata nuklir lebih terbuka untuk dicapai; karena AS yang selama ini mendukung Korea Selatan dan paling keras menentang program nuklir Korea Utara, dapat diajak berunding. Meskipun setelah dua kali pertemuan antara Kim Jong Un dan Presiden AS Donald Trump belum membuahkan hasil, hal tersebut tidak seharusnya dimaknai sebagai tertutupnya upaya denuklirisasi di Semenanjung Korea. Masyarakat internasional sudah terlanjur menyaksikan upaya damai Korea Utara dan Korea Selatan (yang dinilai berhasil), dan pertemuan

Kim Jong Un dan Donald Trump yang selama ini sulit dilakukan, meskipun belum menghasilkan kesepakatan penting terkait isu nuklir, namun tetap signifikan karena langkah diplomasi menjadi pilihan. Ini artinya, peluang untuk kembali terjadinya pertemuan antara Kim Jong Un dan Donald Trump masih terbuka, dan di sinilah masyarakat internasional perlu untuk terus mengawal.

Masyarakat internasional, terutama negara-negara di kawasan harus menjadi bagian penting dalam mengawal terwujudnya denuklirisasi Semenanjung Korea. ASEAN, termasuk Indonesia di dalamnya, tidak boleh menjadi penonton, tetapi harus mengambil peran dalam proses ke arah terwujudnya denuklirisasi Semenanjung Korea. ASEAN, yang memiliki forum pertemuan tersendiri dengan Korea Selatan, perlu mempertimbangkan untuk mengundang Korea Utara dalam peringatan 30 tahun kerja sama ASEAN dan Korea Selatan pada tahun 2019 ini. Indonesia, yang saat ini menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB, juga harus memanfaatkan kedudukan strategisnya itu untuk menjaga agar prospek denuklirisasi Semenanjung Korea tetap terbuka.

### Penutup

Kunjungan Kim Jong Un ke Rusia menegaskan kepentingan Korea Utara untuk memperluas jejaring diplomasinya, terutama terhadap negara Anggota Tetap DK PBB selain AS, yang dianggap bisa “memberi jaminan

keamanan” terhadap rezim Kim pasca-denuklirisasi Semenanjung Korea. Denuklirisasi Semenanjung Korea, yang sudah disepakati oleh Korea Utara dan Korea Selatan melalui Deklarasi Panmunjom, perlu terus dikawal prosesnya oleh masyarakat internasional, termasuk oleh ASEAN. Indonesia, dengan kedudukan strategisnya sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB dalam dua tahun ke depan, juga perlu berkontribusi dalam mewujudkan Semenanjung Korea sebagai kawasan yang bebas dari senjata nuklir.

### Referensi

- “Bertemu Kim Jong Un, Putin Ingin Bahas Isu Nuklir di Semenanjung Korea”, *kompas.com.*, 23 April 2019, <https://internasional.kompas.com/read/2019/04/23/22240991/bertemu-kim-jong-un-putin-ingin-bahas-isu-nuklir-di-semenanjung-korea>, diakses 30 April 2019.
- “Kim, Putin vow to seek closer ties at first talks”, *The Jakarta Post*, 26 April 2019, hal. 12.
- “Kim Cari Dukungan Rusia”, *Kompas*, 25 April 2019, hal. 5.
- “Kim Minta Jaminan”, *Kompas*, 26 April 2019, hal. 8.
- “Kim Ingin Tingkatkan Hubungan dengan Rusia”, *mediaindonesia.com*, 24 April 2019, <https://mediaindonesia.com/read/detail/231801-kim-ingin-tingkatkan-hubungan-dengan-rusia>, diakses 30 April 2019.

"Putin: Kim Jong Un Needs 'Security Guarantees'", cnsnews.com., 25 April 2019, <https://www.cnsnews.com/news/article/patrick-goodenough/putin-kim-jong-un-needs-security-guarantees>, diakses 30 April 2019.

"Panmunjeom Declaration", [japantimes.co.](http://japantimes.co.jp/tag/panmunjeom-declaration/), 27 April 2018, <https://www.japantimes.co.jp/tag/panmunjeom-declaration/>, diakses 30 April 2019.



Sita Hidriyah  
[sita.hidriyah@dpr.go.id](mailto:sita.hidriyah@dpr.go.id)

Sita Hidriyah, S.Pd.,M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Keguruan Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas Atmajaya Jakarta pada tahun 2005 dan pendidikan S2 Hubungan Internasional dari FISIP Universitas Indonesia pada tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda bidang Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Upaya Pemerintah dan Kerjasama Luar Negeri Dalam Pengentasan Kemiskinan Menuju Pembangunan Berkelanjutan" (2013), "Pengungsi Suriah dan Respons Internasional dan Asian Parliamentary Assembly (APA)" (2016), dan "Tantangan Kerjasama Indonesia dan Jepang Dalam Diplomasi Ekonomi " (2016).

#### **Info Singkat**

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

*Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.*